

**KAJIAN FUNGSI PENDIDIKAN IPS TERHADAP DIMENSI TUJUAN
PEMBELAJARAN STUDI KASUS DI SMP NEGERI 2 POLEWALI**

Ngatiyem *)

ABSTRAC

In walking education the world current that aim and function gets implimentation into curriculum, therefore needful a set of plan and arrangement hits aim, content and study material and way that is utilized as guidance of activity management studies learning to reach to the effect education already being determined. Teoritik's ala until now savy hit IPS'S education at schooled still unclear, but such if our mengkaji literature hits IPS'S education at schooled available form medley. Amongst those there is a that view IPS as education that utilize material of social science discipline as one of material source and another views as education of social sciences and basically IPS'S educations at schooled is constitute an intellectual education, humanistic education and citizenship education.

keywords: *Social science, education, teaching and learning evaluation.*

PENDAHULUAN

Dalam bidang pembangunan khususnya dalam dunia pendidikan yang telah dicapai selama ini dapat dicatat dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Dalam undang-undang disebutkan tentang fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Pada pasal 3 disebutkan bahwa fungsi pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta beradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk berkembangnya potensi anak didik agar menjadi manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Selanjutnya pada pasl 4 ayat 3 disebutkan bahwa pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.

Apabila kita menyimak fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tersebut, maka setidaknya terdapat dua dimensi arah pendidikan yaitu : 1). Pendidikan keilmuan dimana pendidikan diarahkan untuk membentuk manusia Indonesia yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan dan 2). Pendidikan humoniora, dimana pendidikan -

*) Staf Pengajar Kopertis Wil. IX Sulawesi DPK pada FKIP – UNASMAN

diarahkan untuk membentuk manusia yang beriman, bertaqwa, berbudi pekerti, yang luhur, berkepribadian, mandiri dan rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Pendidikan dimaksudkan disini adalah sebagai usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau latihan bagi peranannya dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, maka dapat dipahami bahwa untuk melakukan proses pendidikan membutuhkan waktu yang sangat panjang, berkesinambungan dan konsistensi, sehingga pelaksanaannya dapat berlangsung dengan baik.

Pendidikan dalam konteks yang demikian dapat dilakukan melalui jalur sekolah dan luar sekolah dalam beragam jenis dan jenjang pendidikan. Salah satu jenis pendidikan yang termasuk jalur pendidikan formal sebagai jenis pendidikan yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan peningkatan keterampilan peserta didik yang diselenggarakan pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah dan diselenggarakan untuk mengembangkan sikap dan kemampuan serta memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat serta mempersiapkan peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan menengah (pasal 17 undang-undang nomor 20 tahun 2003). Sedangkan pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliah atau bentuk lain yang sederajat dan diselenggarakan untuk melanjutkan dan meluaskan pendidikan dasar serta menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitar serta dapat mengembangkan kemampuan lebih lanjut dalam dunia kerja atau pendidikan tinggi (pasal 18 undang-undang nomor 20 tahun 2003).

Dalam praktek pendidikan, tujuan dan fungsi tersebut di implementasikan ke dalam bentuk kurikulum yakni seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraann kegiatan belajar pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (pasal 1 butir 19 undang-undang nomor 20 tahun 2003). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa komponen utama suatu kurikulum antara lain 1). Seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi, 2). Bahan pelajaran dan 3). Cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar . Selanjutnya komponen kurikulum ini dikembangkan lebih lanjut tiap pelajaran yang didalamnya memuat tujuan kurikuler pada setiap mata pelajaran yang diberikan. Salah satu rumpun mata pelajaran yang diberikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Sampai saat ini pengertian pendidikan IPS yang diberikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah masih belum jelas dan masih menjadi perdebatan. Perdebatan terutama berkenaan dengan proses

pendekatan yang digunakan pada tiap jenjang sekolah serta pilihan materi bagaimana yang tepat diberikan sesuai dengan kebutuhan perkembangan peserta didik.

Keadaan Umum SMP Negeri 2 Polewali

SMP Negeri 2 Polewali dibuka/ didirikan/integrasi dar SMEP Negeri Polewali ke SMP Negeri Polewali tepatnya April tahun 1979 dengan NSS/M : 201192001002 dan dengan NOSN 40600679 yang berlokasi di Kelurahan Polewali Kecamatan Polewali tepatnya di Jalan Durian No.7 Polewali serta memiliki areal sendiri.

Sekolah ini merupakan salah satu sekolah lanjutan pertama yang berlokasi di tengah-tengah ibu kota Kabupaten dan merupakan area jalur sibuk dengan hiruk pikuknya kendaraan karena berdekatan dengan jalur lintas provinsi antara Provinsi Sulawesi Barat dengan provinsi-provinsi lainnya yang ada di Pulau Sulawesi.

Sekolah ini dibina oleh tenaga edukatif/guru tetap sebanyak 30 orang dan tenaga educatif/guru tidak tetap sebanyak 11 orang dan dibantu dengan sebanyak 5 orang tenaga administrasi serta beberapa petugas atau satuan pengamanan (SATPAM). Adapun mengenai jumlah peserta didik tahun pelajaran 2013/2014 sebagaimana yang terlihat pada Table 1.

Tabel 1. Keadaan peserta didik SMP Negeri 2 Polewali

| No | Kelas | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|-------|-------|-----------|-----------|--------|
| 1 | VII | 117 | 141 | 258 |
| 2 | VIII | 104 | 116 | 220 |
| 3 | IX | 83 | 87 | 170 |
| Total | | 304 | 344 | 648 |

Mengenai jumlah ruangan yang dijadikan sebagai sarana untuk kegiatan dalam proses belajar mengajar dan fasilitas lainnya yang dimiliki sebagai sarana penunjang pada SMP Negeri 2 Polewali untuk tahun 2013/2014 masih kurang memadai jika dibandingkan dengan ratio ruangan dengan jumlah peserta didik yang ada saat ini, sehingga dilakukan dengan proses belajar mengajar yang diadakan pagi dan sore untuk mengatasi kurangnya ruang belajar saat ini.

PEMBAHASAN

Secara teoritik sampai saat ini pengertian mengenai pendidikan IPS disekolah masih belum jelas namun demikian apabila kita mengkaji literatur mengenai pendidikan IPS disekolah terdapat beragam bentuk. Diantaranya ada suatu pandangan bahwa IPS sebagai pendidikan yang menggunakan materi dari disiplin ilmu-ilmu sosial sebagai salah satu sumber materi dan pandangan lainnya sebagai pendidikan dari ilmu-ilmu sosial (Hasan, 1996). Sedangkan Shaver (2001) mengemukakan bahwa setidaknya terdapat 3

(tiga) pandangan atau anggapan mengenai makna pendidikan IPS yakni ; (1). beranggapan bahwa pelajaran ilmu-ilmu sosial yang dilaksanakan dalam proses belajar mengajar seperti geografi, sejarah, ekonomi, dan sosiologi harus diajarkan menurut struktur dan metode berpikir ilmuan sosial. Anggapan atau pandangan ini merupakan penggabungan beberapa disiplin ilmu sosial dengan nilai-nilai warganegara hanya akan membingungkan karena nilai-nilai warga negara yang baik itu merupakan hasil sampingan dan akan muncul dengan sendirinya dari pengalaman belajar ilmu sosial, (2). beranggapan bahwa pelajaran ilmu-ilmu sosial di sekolah tidak harus mirip dengan pengorganisasian disiplin ilmu di Perguruan Tinggi. Bukan pemahaman konsep dan metode berpikir ilmuan sosial yang penting. Oleh karena itu, kelompok ini menekankan bahwa pelajaran ilmu sosial disekolah hendaknya terintegrasi dan berisikan materi berupa hasil seleksi dari berbagai disiplin ilmu dan dari masyarakat untuk disajikan dikelas dan (3) beranggapan bahwa ilmu-ilmu disekolah merupakan penyederhanaan dari disiplin ilmu-ilmu sosial untuk tujuan pendidikan.

Pengertian tentang pendidikan IPS disekolah yang menjadi pegangan adalah definisi yang disepakati pada pertemuan HISPIPSI II di Jogyakarta yang menyebutkan bahwa PIPS merupakan penyederhanaan dari disiplin ilmu-ilmu sosial yang diorganisir, disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan (Nyoman 1995). Nampaknya apabila dikaji definisi ini merujuk pada pandangan ketiga yang telah dikemukakan terdahulu. Tetapi dilain pihak seperti Sumantri (1994) mengemukakan ciri utama pendidikan sosial untuk tujuan kerjasama disiplin ilmu pendidikan dengan disiplin ilmu-ilmu sosial untuk tujuan pendidikan, sehingga dari makna ini mengandung seperangkat kemampuan tentang; (1) menyederhanakan bahan pendidikan dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniti untuk tujuan pendidikan, (2). mengorganisir bahan pendidikan baik secara ilmiah maupun secara psikologis untuk tujuan pendidikan, (3) menyajikan suatu metode pendidikan secara ilmiah dan secara psikologis untuk tujuan pendidikan dan (4) menilai hasil belajar pendidikan ilmu pendidikan sosial.

Bruce (1992) mengemukakan bahwa pada dasarnya pendidikan IPS disekolah adalah merupakan suatu *intellectual education, humanistic education* dan *citizenship education*. Ada pula pandangan ini dijadikan rujukan, maka akan berimplikasi terhadap arah pendidikan IPS di sekolah terhadap: (a) penekanan pada tubuhnya nilai-nilai kewarganegaraan, moral idologi negara dan nilai agama, (b) penekanan pada isi dan metode berfikir ilmuan sosial dan (c). penekanan pada *reflective inquiry*. Sehubungan dengan hal tersebut Nyoman (1995) mengemukakan bahwa pemikiran merupakan kajian didalam program pendidikan yang meliputi tidak saja mengenai hubungan antar manusia di masyarakat, tetapi juga program pengajaran yang terkait dengan masalah pendekatan, metodologi dan penilaian dalam rangka proses pendidikan di sekolah.

Berdasarkan pemahaman terhadap makna pendidikan IPS, maka akan muncul pertanyaan atas dasar pertimbangan filosofis dan teori pendidikan bahwa pendidikan IPS seyogianya diberikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang dilakukan dengan pendekatan yang berbeda. Sudahkah pembelajaran IPS saat ini diarahkan pada tujuan dan fungsi pendidikan yang kita harapkan dan bagaimana selayaknya mengorganisasi materi IPS di SMP Negeri 2 Polewali. Jika kita memperhatikan pengertian tentang pendidikan IPS yang telah dikemukakan terdahulu, maka berimplikasi terhadap pemilihan materi pada pendidikan IPS di sekolah yang selayaknya lebih berorientasi dan mempertimbangkan pada kepentingan pendidikan dibandingkan pada pengembangan keilmuan.

Orientasi dan pengembangan pendidikan ini sudah barang tentu akan sangat tertarik dengan aspek perkembangan peserta didik, perkembangan dengan teori belajar dan proses belajar, aspek lingkungan belajar serta pertimbangan terhadap aspek kondisi sosial politik yang berkembang. Hasan (1996) mengemukakan bahwa IPS sebagai materi dalam konteks ini, dilihat sebagai materi pendidikan dapat berarti sebagai substansi dan proses. Dalam arti substansi, maka materi pendidikan akan memuat hal antara lain tentang : pandangan, tema topik, fenomena, fakta, peristiwa, prosedur, konsep, generalisasi dan teori. Sedangkan materi pendidikan dalam arti proses akan memuat beberapa hal antara lain berkenaan dengan proses, prosedur dan langkah yang harus dilaksanakan peserta didik dalam mempelajari materi secara substantif. Hal ini hendaknya dalam pembelajaran IPS disekolah ini kedua hal ini yakni substansi dan proses sebagai materi pendidikan IPS menjadi perhatian yang seimbang, terutama bagi para pengembang kurikulum IPS.

Muchtar (2001) mengemukakan bahwa bahan pelajaran IPS di sekolah tidak diorganisasikan atas dasar acuan struktur disiplin ilmu sosial baik dalam bentuk penyederhanaan atau seleksi untuk tujuan pendidikan IPS, sehingga berdampak pada proses pembelajaran IPS yang membosankan dan kurang menarik, maka pelajaran IPS semakin terlepas dari sumber materi yang akademis. Agar pembelajaran IPS di sekolah ini lebih berkualitas, maka hendaknya materi pelajaran IPS mampu membantu peserta didik menjadi warganegara yang efektif dengan memfokuskan perhatian pada level pengetahuan tingkat tinggi dan bukan menyajikan sekedar fakta-fakta, sehingga dengan mengajarkan IPS tentang perkembangan dengan menggunakan materi pelajaran yang dapat membantu peserta didik untuk mengembangkan diri, klarifikasi, reflektif dan identifikasi positif dengan muatan/budaya lokal maupun secara nasional.

B. Pembelajaran IPS dan Potensi Peserta Didik.

Dalam kerangka teoritik pembelajaran IPS di sekolah selayaknya dapat mengungkapkan tentang potensi berfikir peserta didik, sehingga tujuan

pendidikan yang ingin dicapai akan lebih mudah diupayakan. Michaelis (1990) mengemukakan bahwa keterampilan berfikir yang dapat dikembangkan dalam pembelajaran IPS di sekolah antara lain pada tingkat rendah dan pada tingkat tinggi. Pada tingkat rendah keterampilan berfikir meliputi; *perception*, *association*, dan *concept attainment*. Sedangkan keterampilan berfikir pada tingkat tinggi meliputi *problem solving*, *criticaal thinking* dan *cerative thinking*.

Keterampilan berfikir dianggap sebagai sumberdaya yang belum banyak dioptimalkan dalam proses pembelajaran IPS di sekolah, sehingga pada gilirannya kemampuan peserta didik kurang terproduksi secara baik, sehingga berakibat pada rendahnya kualitas pembelajaran IPS serta hasil belajar yang rendah. Nickerson (1985) mengemukakan bahwa ada 3 (tiga) katagori berfikir yakni : (a) *content thinking skill* (b) *reasoning skills* dan (c) *learning to learn skill*. Ketika kemampuan ini seharusnya diaplikasikan kedalam pembelajaran IPS. Oleh karena itu, pengajaran *inquiry* dapat menjadi alternatif model yang dapat dipilih dalam pembelajaran IPS baik pembelajaran tingkat dasar dan pembelajaran pada tinggi, hal ini dimaksudkan untuk mengungkap kemampuan berfikir peserta didik.

James (1997) mengemukakan bahwa metode *inquiry* ini merupakan pendekatan yang dapat mengembangkan kemampuan berfikir kearah yang lebih baik. Proses pendekatan *inquiry* ini meliputi aktivitas dari para guru dan juga para peserata didik, sehingga terdapat keterkaitan dalam pelajaran IPS antara guru dan peserta didik, keduanya aktif dalam proses kegiatan pembelajaran. Belajar *inquiry* merupakan upaya penguasaan dan pengoptimalkan potensi berfikir peserta didik untuk menemukan makna dan hakekat dari suatu fenomena melalui pendekatan ilmiah, sistematis, rational, logis dalam rangka memecahkan masalah. Sedangkan mengajar *inquiry* merupakan langkah menciptakan kondisi yang kondusif untuk proses belajar peserta didik, sehingga dapat mengembangkan potensi fikirnya secara optimal.

Jika memperhatikan makna pendidikan IPS di SMP Negeri 2 Polewali, maka IPS diberikan kepada peserta didik di sekolah ini sebagai upaya untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan sosial, mengembangkan intelektual dan kemampuan nalar peserta didik dan berpotensi untuk mentransformasikan kehidupan masyarakat. Dalam rangka pemikian ini, maka IPS sebagai mata pelajaran di sekolah ini hendaknya mampu menjadi media terjadinya respon positif dan rational terhadap perubahan sosial. Sumantri (1994) mengemukakan bahwa pelajaran IPS di sekolah masih sarat dengan hafalan dan kurang mengali potensi berfikir peserta didik. Para guru lebih banyak terpaku menjelaskan bahan pelajaran yang termuat dalam kurikulum dan kurang mengembangkannya menjadi bahan materi pelajaran

yang menarik dan actual, sehingga dapat diduga jika pembelajaran IPS di sekolah sampai sekarang kurang berkualitas.

Lebih lanjut dikemukakan bahwa pembelajaran IPS lebih banyak mengandalkan materi yang termuat dalam buku paket, kurang menggunakan media dan alat peraga serta kurang memanfaatkan lingkungan sebagai sumber informasi IPS. Oleh karena itu, perlu segera dilakukan pergeseran paradigma dalam proses pembelajaran IPS yang memandang peserta didik sebagai obyek menjadi kearah peserta didik sebagai subyek pendidikan. Peran guru sebagai penyampai informasi kearah peserta didik menjadi pembimbing dan fasilitator dalam proses belajar. Posisi guru dalam proses pembelajaran IPS di sekolah semakin penting sebagai pembimbing dan fasilitator belajar, terlebih lagi pada masa kini dan masa datang yang sering disebut sebagai era informasi. Peran guru sebagai inovator bagi peningkatan kualitas pembelajaran IPS disekolah harus segera diwujudkan. Guru hendaknya memiliki kewenangan penuh untuk mengembangkan pembaharuan proses pembelajaran yang berorientasi pada tujuan pendidikan. Dalam kaitan ini hendaknya guru berperan sebagai agen pembaharuan yakni yang dapat menjadi sumber belajar peserta didik dan motivator bagi peserta didik untuk terus belajar, sehingga dapat lebih mengembangkan daya fikirnya. Bagi upaya peningkatan kualitas pembelajaran IPS di sekolah, sudah selayaknya posisi guru sebagai pengambil keputusan pembaharuan pembelajaran di sekolah ini segera diwujudkan. Kewenangan untuk mengembangkan materi pendidikan IPS di kelas hendaknya diberikan secara penuh kepada guru.

SIMPULAN

- a. Pendidikan sebagai suatu proses pembudayaan hendaknya dapat dipandang sebagai upaya yang berkesinambungan dan bertujuan. Oleh karena itu, segenap proses yang menyertai usaha pendidikan ini diharapkan berorientasi pada pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebagai suatu kebijaksanaan.
- b. Proses pembelajaran IPS dapat dipandang sebagai upaya impliemetasi dari suatu kebijakan pendidikan dalam hidup mikro dan senantiasa diarahkan pada pendekatan pendidikan yang memperhatikan aspek perkembangan peserta didik aspek teori pembelajaran dan aspek dinamika kemasyarakatan yang terjadi.
- c. Pembelajaran IPS di sekolah seyogianya menekankan pada upaya pengembangann dan peningkatan kemampuan berfikir tingkat tinggi yang siap untuk memecahkan masalah kemasyarakatan sesuai dengan perkembangan psikologis peserta didik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2003. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20, tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Bruce Joce. 1992. *New Strategies for Social Studies*. Chicago. Science Research Associates, Inc.
- Hasan. 1996. *Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial*, FPIPS- IKIP Bandung
- James and Bruce A. Celg Jr. 1997. *teaching Strategies for the Social Studies Inquiry, Valuing and Decision making*, Massachusetts, Addison Wesley Publishing Company.
- Michaelis, John 1990, *Social Studies for Children. A Guide to Basic Instruction*, New Jersey, Prentice Hall, Inc.
- Muchtar. 2001. *Pengembangan kemampuan berfikir dan nilai Dalam Pendidikan UPI Bandung*.
- Nickerson, Raymond. 1999. *The Teaching of Thinking* New Jersey ; Lawrence Erlbaum.
- Nyoman Dekker. 1995. *Makalah Ilmu Pengetahuan Sosial sebagai Suatu Disiplin (Suatu Pengantar)* Tidak dipublikasikan.
- Shaver. 2001. *Handbook of Research on Social Studies Teaching and Learning* Macmillan publishing Company. New York.
- Sumantri. 1994. *Makalah; Masalah dan Prospek Ilmu Pengetahuan Sosial di Sekolah dan LPTK dalam Pendidikan Nasional dan Era Globalisasi*. IKIP Malang. Tidak dipublikasikan.